



RENCANA KERJA

DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MEDAN
TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA MEDAN
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024. Rencana Kerja Tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari tahapan program dan kegiatan tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan dalam upaya memberikan arah maupun pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan pada Tahun 2024. Dalam rencana kerja urusan ketenagakerjaan ini merupakan kegiatan yang juga berupa solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2024 pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MEDAN,**

ILLYAN CHANDRA SIMBOLON, S.STP, M.SP
Pembina Tk. I(IV/b)
NIP 198010231999121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT	
DAERAH TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan	
Fungsi Perangkat Daerah	20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	34
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	34
3.3. Program dan Kegiatan	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	44
BAB V PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

TABEL

Tabel.2.1 Program dan Anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2021..... 5

Tabel 2.2 Efektifitas Penggunaan Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021... 7

Tabel 2.3 Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021... 8

Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021..... 10

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan..... 17

Tabel 2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023..... 22

Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023... 33

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023..... 36

Tabel 4.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 44

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN
NOMOR :**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA
MEDAN,**

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2024 yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Data dan Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja;
4. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2008-2028;
5. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 – 2026;
7. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.
8. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 74 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. mengumpulkan dan menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranwal Renja PD) Tahun 2024 pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan;
2. menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranhir Renja PD) Tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan;
3. memberikan masukan terhadap Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan;
4. memberikan saran dan koreksi hasil Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan;
5. menggandakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan;
6. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan tugas Tim Penyusun dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MEDAN,**

ILLYAN CHANDRA SIMBOLON, S.STP, M.SP

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP 198010231999121001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Kota Medan
Tanggal : Januari 2023
Nomor :

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN TAHUN 2024

NO	NAMA / NIP.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ILLYAN CHANDRA SIMBOLON, S.S.T.P., M.S.P. NIP. 19801023 199912 1 001	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Drs. RIDWAN SITANGGANG NIP. 19660501 198603 1 005	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	FAISAL AMRI TAMPUBOLON, S.E., M.M. NIP. 19800917 200902 1 003	Ketua Tim Lingkup Penyusunan Program	Sekretaris
4.	RAMADHAN, SKM NIP. 19840527 201001 1 017	Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas	Anggota
5.	DUMARIA EVI MAWARTIKU PALAMARTA BR. GULTOM, S.H., M.H. NIP. 19830704 201101 2 016	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
6.	HASANAL HARIS HARAHAHAP, S.S.T.P. NIP. 19840419 200212 1 002	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
7.	MARISI S.P SINAGA, SE, M.Si NIP. 19790129 201101 1 002	Kepala Bidang Perselisihan, Syarat Kerja dan Pengupahan	Anggota
8.	BEZANOLO HAREFA, SE,M.Si NIP. 19810919 200904 1 006	Perencana Ahli Muda	Anggota
9.	SUCI ANGGRAENY PASARIBU, S.S.T NIP. 19830614 201001 2 036	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
10.	RAHMAT IRFAN POHAN, S.Kom NIP. 19930319 201903 1 002	Pranata Komputer	Anggota

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Kota Medan
Tanggal : 07 Januari 2022
Nomor : 800/018

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN TAHUN 2023**

NO	NAMA / NIP.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. RIDWAN SITANGGANG NIP. 19660501 198603 1 005	Plt. Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Drs. RIDWAN SITANGGANG NIP. 19660501 198603 1 005	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	FAISAL AMRI TAMPUBOLON, SE, M.M NIP. 19800917 200902 1 003	Subkor PenyusunanProgram	Sekretaris
4.	RAMADHAN, SKM NIP. 19840527 201001 1 017	Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas	Anggota
5.	TIMBUL ANTONISU, SH NIP. 19790908 200502 1 009	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
6.	Drs. SUKAIMAN, M.Pem.I NIP. 19660621 199802 1 001	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
7.	MARISI S.P SINAGA, SE, M.Si NIP. 19790129 201101 1 002	Kepala Bidang Perselisihan, Syarat Kerja dan Pengupahan	Anggota
8.	BEZANOLO HAREFA, SE,M.Si NIP. 19810919 200904 1 006	Perencana	Anggota
9.	SUCI ANGGRAENY PASARIBU, S.S.T NIP. 19830614 201001 2 036	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
10.	RAHMAT IRFAN POHAN, S.Kom NIP. 19930319 201903 1 002	Pranata Komputer	Anggota



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan, strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Rencana Strategis (Renstra) secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Pemerintah Kota Medan. Rencana Kerja



Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dalam hal ini Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sebagai Perangkat Daerah menyusun Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada RPJMD dan RKPD Kota Medan serta Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2021-2026.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Medan Tahun 2024. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2024 dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan RKPD Kota Medan Tahun 2024, dengan melihat kondisi eksisting dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan



- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - h. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan;
 - i. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - j. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2008-2028;
 - k. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
 - l. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 – 2026;
 - m. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026
 - n. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - o. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 74 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari dari Penyusunan Rencana Kerja Ketenagakerjaan Kota Medan adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan yang menjadi tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Ketenagakerjaan Kota Medan adalah guna merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2024.



1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tahun 2024, sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dari Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.

Bab II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Berisikan evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja perangkat daerah, program dan kegiatan

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan pada Tahun 2022 mendapatkan alokasi anggaran dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Murni Kota Medan sebesar Rp. 16.384.224.716,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.490.979.006,- dan belanja langsung sebesar Rp. Rp. 7.893.245.710. Pada APBD-P, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mendapat alokasi tambahan anggaran sebesar Rp. 2.975.301.034 sehingga total pagu anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sebesar Rp.19.359.525.750 yang didukung oleh 4 program dan 16 kegiatan yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

Tabel 2.1 Program dan Anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2022

No	Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
		Pagu Anggaran	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Jenis Belanja
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11,274,480,066	<ul style="list-style-type: none">B.Tidak Langsung Rp. 8.490.979.006B. Langsung Rp. 2.783.501.060	Rp. 14,394,091,100	<ul style="list-style-type: none">B.Tidak Langsung Rp. 10.908.940.003B. Langsung Rp. 3.485.151.097
2.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 2,034,311,200	Belanja Langsung	Rp. 2,485,945,700	Belanja Langsung
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 996,966,950	Belanja Langsung	Rp. 863,522,450	Belanja Langsung
4.	Program Hubungan Industrial	Rp. 2,078,466,500	Belanja Langsung	Rp. 1,615,966,500	Belanja Langsung
Total		Rp. 16,384,224,716		Rp. 19,359,525,750	

Selama Tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung dari APBD Pemerintah Kota Medan sebesar Rp. 8.450.585..747 dengan realisasi atau serapan anggaran sebesar 7.227.704.510 (85,52%), dan belanja tidak langsung sebesar Rp.10.908.940.097 dengan realisasi sebesar Rp. 10.111.391.073 (92,68%). Dengan demikian SiLPA (Sisa Lebih Pendapatan dan Anggaran) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2022 sebesar Rp. 2.020.430.167 atau 10,43%. Keadaan ini, dari sisi anggaran terjadi penghematan anggaran tetapi dari sisi capaian kinerja output (keluaran) dan outcome (hasil) akan mengalami penurunan karena ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana karena kebijakan Pemerintah Daerah Kota Medan diantaranya penghapusan anggaran SPPD Dalam Daerah yang dianggap sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi OPD.



Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Per Program
Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2022

No	NAMA PROGRAM	Pagu Anggaran	Penyerapan Anggaran		Efisiensi
		Rp	Rp	%	Rp.
1	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14,394,091,100	13,213,359,443	91,8	1,180,731,657
		B.Tidak Langsung Rp. 10.908.940.003 B. Langsung Rp. 3.485.151.097	B.Tidak Langsung Rp. 10.111.391.073 B. Langsung Rp. 3.101.968.370		
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2,485,945,700	1,886,801,827	75,9	599,143,873
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	863,522,450	668,510,263	77,42	195,012,187
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1,615,966,500	1,570,424,050	97,18	45,542,450
JUMLAH		19,359,525,750	17,339,095,583	89,56	2,020,430,167

2.1.1 Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran

Selanjutnya, salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan penganggaran adalah anggaran berbasis kinerja. Menurut Halim (2017) “anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan ouput dan outcome yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapain outcome dari output tersebut”. Output dan outcome tersebut dituangkan didalam target kinerja yang telah dibuat pada setiap unit kinerja. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran berbasis kinerja adalah sistem penyusunan anggaran berdasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang akan dicapai. Indikator utama anggaran berbasis kinerja diantaranya adalah tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Mahsun (2009) mendefinisikan **efektivitas** sebagai gambaran mengenai kemampuan dalam merealisasikan anggaran belanja yang sebelumnya telah dianggarkan. Tingkat efektivitas dihitung melalui perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun kriterianya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 adalah :

- a. Tingkat pencapaian diatas 100% : sangat efektif
- b. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% : efektif
- c. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% : cukup efektif
- d. Tingkat pencapaian 60% - 80% : kurang efektif
- e. Tingkat pencapaian dibawah 60% : tidak efektif

Sedangkan **efisiensi**, menurut Mardiasmo (2018:5) merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Tingkat efisensi diukur dengan memperbandingkan



capaian output dengan realisasi anggaran yang kemudian ditransformasikan dalam nilai efisiensi. Adapun kriteriannya adalah nilai efisiensi lebih dari 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat efisien; nilai efisiensi lebih dari 80% sampai 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan efisien; nilai efisiensi lebih dari 60% sampai 80%, pelaksanaan anggaran dikatakan cukup efisien, nilai efisiensi lebih dari 50% sampai 60%, pelaksanaan anggaran dikatakan kurang efisien dan nilai efisiensi dibawah 50%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat kurang efisien.

jika dilihat dari tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran khususnya pada belanja langsung dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2022 ditunjukkan oleh tabel 2.2 dan 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Efektifitas Penggunaan Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Dinas Ketenagakerjaa Kota Medan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Kriteria
1.	Meningkatnya Keahlian Tenaga kerja (Didukung dengan Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja)	2,485,945,700	1,886,801,827	75,9	Kurang Efektif
2.	Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan (Didukung dengan Program Penempatan Tenaga Kerja)	863,522,450	668,510,263	77,42	Kurang Efektif
3.	Meningkatnya perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Didukung dengan Program Hubungan Industrial)	1,615,966,500	1,570,424,050	97,18	Efektif
TOTAL		4.965.434.650	4.125.736.140	83.08	Cukup Efektif

Pada tabel 2.3 diatas, dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas penggunaan anggaran belanja langsung pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tahun 2022 dalam rangka pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan, secara rata-rata cukup efektif. Untuk pencapaian sasaran strategis pertama yakni meningkatnya keahlian tenaga kerja melalui pelaksanaan Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja tingkat efektifitasnya adalah 75,9% dengan kriteria kurang efektif. Artinya realisasi anggaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan pelatihan kerja dan produktifitas kerja belum dapat secara optimal terserap dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan anggaran Dana Insentif Daerah (DID) yang penganggarnya melalui pergeseran APBD pada awal Bulan Desember 2022. Dengan waktu pelaksanaan yang sangat singkat (\pm 1 bulan) pelaksanaan kegiatan pelatihan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya sehingga menjadi SiLPA. Sasaran strategis kedua yakni meningkatnya Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui pelaksanaan program



penempatan tenaga kerja tingkat efektifitasnya adalah 77.42% dengan kriteria kurang efektif. Artinya serapan anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan penempatan tenaga kerja masih belum secara optimal digunakan/dilaksanakan untuk mengintervensi pencapaian sasaran tersebut. Hal ini juga disebabkan karena ada beberapa kegiatan seperti Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online dengan realisasi anggaran Rp.0. Kegiatan ini tidak terlaksana karena adanya pengintegrasian aplikasi CINLOK pada aplikasi SIDUTA (Sistem Informasi Terpadu Ketenagakerjaa) sehingga anggaran yang ada menjadi SiLPA.

Dan untuk sasaran strategis yang ke-3 yaitu meningkatnya perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak melalui pelaksanaan program hubungan industrial tingkat efektifitasnya sebesar 97,18% dengan kriteria efektif. Dengan katan lain, serapan anggaran dari pagu anggaran yang telah ditetapkan cukup optimal direalisasikan untuk mengintervensi pencapaian sasaran tersebut. Namun secara keseluruhan tentunya masih dibutuhkan upaya dan usaha dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam mengefektifkan penggunaan anggaran kedepannya khususnya pada kriteria yang masih kurang efektif sehingga pagu anggaran yang ada dapat dioptimalkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yakni peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.4 Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Langsung per Sasaran
Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2022

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Realisasi Anggaran (RA)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Tingkat Capaian Kinerja (CK)	Efisiensi/E (%) (CK-RA)	Nilai Efisiensi (50+(E/20*50)	Kriteria
1.	Meningkatnya Keahlian Tenaga kerja Indikator Kinerja: <i>Persentase Pencari Kerja/ Tenaga Kerja yang Bersertifikat</i>	75,9%	90%	98,8%	109.7%	33,8%	134,5%	Sangat Efisien
2	Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan Indikator Kinerja: <i>Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan</i>	77,42%	40%	64,7%	161,7%	84,28%	260,7%	Sangat efisien



3	Meningkatnya perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak Indikator Kinerja : <i>Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak</i>	97,18%	70%	75,2%	107,4%	10,2%	75,5%	Cukup Efisien
---	---	--------	-----	-------	--------	-------	-------	---------------

Pada tabel 2.4 diatas yang menggambarkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran Belanja Langsung per sasaran pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pada sasaran strategis ke-1 ”meningkatnya Keahlian Tenaga kerja dengan **Indikator Kinerja: Persentase Pencari Kerja/ Tenaga Kerja yang Bersertifikat**, Nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar 134,5% dengan kriteria **sangat efisien**. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat capaian output (kinerja) lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat realisasi anggaran (input). Dengan kata lain, keadaan ini sejalan dengan prinsip efisiensi yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.
- Pada sasaran strategis ke-2 ” Meningkatkan Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan dengan **Indikator Kinerja: Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan**, Nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar 260,7% dengan kriteria **sangat efisien**. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat capaian output (kinerja) lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat realisasi anggaran (input). Dengan kata lain, keadaan ini sejalan dengan prinsip efisiensi yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.
- Pada sasaran strategis ke-3 ” Meningkatkan perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dengan **Indikator Kinerja : Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak**, , Nilai efisiensi penggunaan anggaran sebesar 138,75% dengan kriteria **cukup efisien**. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat capaian output (kinerja) lebih rendah dibandingkan dengan tingkat realisasi anggaran (input). Dengan demikian, pelaksanaan anggaran melalui program hubungan industrial dengan realisasi anggaran sebesar 97,18% tidak berbanding lurus dengan tingkat capaian kinerja yang ditetapkan yakni hanya sebesar 75,2%. Diharapkan kedepan hal ini menjadi perhatian untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan anggaran.



2.1.2 Capaian Kinerja atas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas ketenagakerjaan Kota Medan telah menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5 (T.C 29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022



RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN

2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan					15,765,926,533		719,333,400		863,522,450		668,510,263		1,387,843,663		8.80
			Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	%	50	15,765,926,533	22	719,333,400	40	863,522,450	64.7	668,510,263		1,387,843,663		8.8
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				15,220,926,533		719,333,400		863,522,450		668,510,263		1,387,843,663		9.12
			Persentase pemenuhan Lowongan pekerjaan	%	60	15,220,926,533	104	719,333,400	50	863,522,450	84.12	668,510,263	104	1,387,843,663	52	9.12
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota				4,806,435,923		92,833,900		276,834,850		262,363,232		355,197,132		7.39
			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	orang	280	4,806,435,923		92,833,900	200	276,834,850	100	262,363,232	75	355,197,132	37.5	7.39
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				844,792,348		63,271,200		139,034,850		128,235,743		191,506,943		22.67
			Jumlah kegiatan kunjungan kerja dalam daerah	Kegiatan	1				0		0		0		0	
			Jumlah Pencari Kerja/Calon Pencari Kerja yang mendapatkan Bimbingan	orang	60		120		150		150		270		100	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	orang	2300				0							
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				2,159,411,560		0		137,800,000		134,127,489		134,127,489		6.21



RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN

2024

				Jumlah Calon Tenaga Kerja/Tenaga Kerja Disabilitas yang dilayani	orang	55				50		27		27		27	
				Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	orang	200				0							
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				3,083,799,945		363,921,000		216,404,000		109,104,000		473,025,000		15.34
				Persentase Lowongan Kerja dibandingkan dengan Pencari Kerja	%	50	3,083,799,945		363,921,000	50	216,404,000	58.3	109,104,000	68.3	473,025,000	63	15.34
			Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				914,984,000		188,155,000		106,900,000		900,000		189,055,000		20.66
				Jumlah Aplikasi Informasi Pasar Kerja yang dipergunakan	Aplikasi	1		1		1		0		1		20	
				Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	3				0							
			Job Fair/Bursa Kerja				1,766,259,945		175,766,000		109,504,000		108,204,000		283,970,000		16.08
				Jumlah Lowongan Kerja pada Job Fair/Bursa Kerja	Lowongan	150		1400		100		178		278		139	
				Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	orang	700				0							
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				5,243,362,740		229,175,000		286,935,000		247,252,591		476,427,591		9.09
				Persentase PMI yang bermasalah	%	20	5,243,362,740		229,175,000	25	286,935,000	35.72	247,252,591	37	476,427,591	74	9.09
			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				3,931,840,740		229,175,000		286,935,000		247,252,591		476,427,591		12.12
				Jumlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	Kali	5				25		25		13		260	
				Jumlah PMI yang mendapatkan perlindungan	orang	160		755		150		162		927		879.38	
				Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	orang	750				0							
			Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1,288,461,950		0		83,348,600		49,790,440		49,790,440		3.86
				Jumlah Tenaga Kerja Asing yang Lokasi Kerja dalam I (satu) Daerah Kota	orang	30	1,288,461,950		0	35	83,348,600	168	49,790,440	168	49,790,440	240	3.86
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1,288,461,950		0		83,348,600		49,790,440		49,790,440		3.86



RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN

2024

				Jumlah kegiatan kunjungan kerja dalam daerah	Kegiatan	1				0		0		0		0	
				Jumlah Tenaga Kerja Asing yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kota	orang	40				35		168		168		220	
				Jumlah tenaga kerja asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kota	orang	185				0							
2	Meningkatnya Keahlian Tenaga kerja						24,636,447,898		1,099,372,865		2,485,945,700		1,886,801,827		2,986,174,692		12.12
				Persentase tenaga kerja yang memperoleh sertifikasi keahlian			24,636,447,898		1,099,372,865		2,485,945,700		1,886,801,827		2,986,174,692		12.12
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				24,636,447,898		1,099,372,865		2,485,945,700		1,886,801,827		2,986,174,692		12.12
				Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	%	20	24,636,447,898	13.2	1,099,372,865		2,485,945,700	8.6	1,886,801,827	13.2	2,986,174,692	57.3	12.12
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				22,865,903,111		1,099,372,865		2,433,784,100		1,840,021,827		2,939,394,692		12.85
				Jumlah Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kegiatan	2	22,865,903,111		1,099,372,865		2,433,784,100	10	1,840,021,827	20	2,939,394,692	100	12.85
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				15,907,045,437		982,818,265		1,898,961,000		1,403,863,827		2,386,682,092		15.00
				Jumlah Tenaga Kerja/Calon Tenaga Kerja yang Dilatih	orang	460		244		:303		263		507		106.09	
			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	2104	6,958,857,674		116,554,600	0	534,823,100		436,158,000		552,712,600		7.94
				Jumlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia	Kali	15				416		120		120		28.8	
				Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang bekerjasama	Lembaga	215		30		200		200		230		67.5	



RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN

2024

				Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	155				0							
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				319,938,400		0		9,600,000		9,600,000		9,600,000		3
				Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Lembaga	370	319,938,400		0	330	9,600,000	20	9,600,000	20	9,600,000	40	3
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				319,938,400		0		9,600,000		9,600,000		9,600,000		3
				Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	50				50		20		20		40	
			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	75	430,480,137		0	0	42,561,600		37,180,000		37,180,000		8.64
				Jumlah Dokumen Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dokumen	30	430,480,137		0	16	42,561,600	16	37,180,000	16	37,180,000	60	8.64
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				430,480,137		0		42,561,600		37,180,000		37,180,000		8.64
				Jumlah Dokumen Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dokumen	20				16		16		0		60	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	64				0							
3	Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah						148,848,800,470		10,473,486,896		14,394,091,100		13,213,359,443		23,686,846,339		15.91
				Persentase peningkatan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia			148,848,800,470		10,473,486,896		14,394,091,100		13,213,359,443		23,686,846,339		15.91



RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN

2024

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				148,848,800,470		10,473,486,896		14,394,091,100		13,213,359,443		23,686,846,339		15.91
			Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	148,848,800,470	200	10,473,486,896	100	14,394,091,100	100	13,213,359,443	200	23,686,846,339	100	15.91
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2,536,819,565		49,799,900		41,792,000		38,266,000		88,065,900		3.47
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	5	2,536,819,565		49,799,900	I	41,792,000	I	38,266,000	2	88,065,900	100	3.47
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				608,319,565		49,799,900		41,792,000		38,266,000		88,065,900		14.48
			Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2		1		I		1		2		100	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20				0							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				115,933,013,406		8,378,965,428		10,956,534,503		10,158,148,573		18,537,114,001		15.99
			Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	1	115,933,013,406		8,378,965,428	12	10,956,534,503	9	10,158,148,573	21	18,537,114,001	87.5	15.99
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				115,634,097,300		8,378,965,428		10,908,940,003		10,111,391,073		18,490,356,501		15.99
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun	Bulan	1		1		14		14		21		100	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	336				0							
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				298,916,106		0		47,594,500		46,757,500		46,757,500		15.64
			Kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Kali	15				15		15		15		100	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	4				0							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3,856,281,342		124,200,000		305,452,700		305,442,300		429,642,300		11.14
			Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Tahun	1	3,856,281,342		124,200,000	I	305,452,700	1	305,442,300	2	429,642,300	100	11.14



RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN

2024

			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				1,644,837,896		124,200,000		152,122,500		152,122,500		276,322,500		16.80
				Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	stel	1		1		150		150		300		100	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	300				0							
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1,458,443,446		0		153,330,200		153,319,800		153,319,800		10.51
				Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan	orang	80				75		75		75		50	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	320				0							
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				5,208,177,939		373,271,325		632,965,700		500,777,100		874,048,425		16.78
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	1	5,208,177,939		373,271,325	12	632,965,700	12	500,777,100	24	874,048,425	100	16.78
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				818,103,526		61,098,300		82,000,000		79,859,750		140,958,050		17.23
				Jumlah tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12		12		12		12		24		100	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	16				0							
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1,390,080,958		119,954,225		130,000,000		99,994,650		219,948,875		15.82
				Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun	Bulan	1		1		12		9		24		100	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	16				0							
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				995,895,405		97,576,800		108,445,700		98,501,500		196,078,300		19.69
				Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	1		1		12		12		24		100	



RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN

2024

				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	16				0							
				Penyediaan Bahan/Material			94,011,868		0		64,205,000		0		0		0
				Jenis dan jumlah bahan/material yang dibeli	Unit/jenis	5				5		0		0		0	
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	16				0							
				Fasilitasi Kunjungan Tamu			457,310,350		0		48,000,000		47,645,000		47,645,000		10.42
				Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Pemerintah Kota Medan	Bulan	1				12		12		24		100	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	48				0							
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1,308,875,834		94,642,000		181,415,000		157,656,200		252,298,200		19.28
				Terselenggaranya Rapat-rapat dan Konsultasi selama 1 tahun	Triwulan	4		4		4		4		8		100	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	48				0							
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			143,900,000		0		18,900,000		17,120,000		17,120,000		11.9
				Jumlah Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dokumen	3000				200		0		0		0	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	180				0							
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4,966,209,417		399,846,000		865,108,100		709,830,000		1,109,676,000		22.34
				Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	1	4,966,209,417		399,846,000	12	865,108,100	12	709,830,000	24	1,109,676,000	100	22.34
				Pengadaan Mebel			1,865,296,859		151,680,000		188,576,800		186,800,000		338,480,000		18.15
				Jumlah Tersedianya Mebel	1 Tahun	1		1		1		1		2		100	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	150				0							
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1,853,915,158		0		676,531,300		523,030,000		523,030,000		28.21



RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN

2024

				Jumlah Tersedianya Peralatan dan Mesin	Bulan	1				9		9		18		100	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	40				0							
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10,307,116,389		809,962,975		1,103,238,097		1,065,619,396		1,875,582,371		18.20
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	1	10,307,116,389		809,962,975	12	1,103,238,097	12	1,065,619,396	24	1,875,582,371	100	18.2
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				704,122,136		609,216,390		9,550,000		9,550,000		618,766,390		87.88
				Tersedianya jasa surat menyurat	Bulan	1		1		12		12		24		100	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	16				0							
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3,209,823,032		160,762,610		366,161,997		348,527,871		509,290,481		15.87
				Jumlah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100		83.32		100		100		200		100	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	48				0							
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				6,393,171,221		39,983,975		727,526,100		707,541,525		747,525,500		11.69
				Jumlah Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi	Bulan	1		1		12		12		24		100	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	48				0							
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6,041,182,412		337,441,268		489,000,000		435,276,074		772,717,342		12.79
				Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Bulan	1	6,041,182,412		337,441,268	12	489,000,000	12	435,276,074	24	772,717,342	100	12.79
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2,135,072,600		129,434,268		194,000,000		143,049,869		272,484,137		12.76



RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN

2024

				Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	I	I	I	12		12		24		100	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	40			0							
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1,091,726,500	0		120,000,000		117,983,205		117,983,205		10.81
				Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Bulan	1			9		9		15		100	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	40			0							
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1,100,126,250	99,766,000		150,000,000		149,343,000		249,109,000		22.64
				Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	%	100		99.77	100		100		100		100	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4			0							
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				275,031,562	0		25,000,000		24,900,000		24,900,000		9.05
				Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Tahun	I			I		I		2		100	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	4			0							
4	Meningkatnya perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak						21,578,852,374	1,529,716,775		1,615,966,500		1,570,424,050		3,100,140,825		14.37
				Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak			21,578,852,374	1,529,716,775		1,615,966,500		1,570,424,050		3,100,140,825		14.37



RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN

2024

		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					21,578,852,374		1,529,716,775		1,615,966,500		1,570,424,050		3,100,140,825		14.37
				Persentase Peningkatan lembaga hubungan industrial di perusahaan	%	10	2,027,051,900	7.6	113,321,800	10	21,000,000	7.6	14,087,400	7.6	127,409,200	38	6.29
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				2,027,051,900		113,321,800		21,000,000		14,087,400		127,409,200		6.29
				Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Dokumen	5	2,027,051,900		113,321,800	5	21,000,000	15	14,087,400	25	127,409,200	150	6.29
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				1,000,054,900		63,321,800		21,000,000		14,087,400		77,409,200		7.74
				Jumlah Perusahaan yang didata	Lembaga	160		50		150		30		50		31.25	
				Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	laporan	36				0							
				Persentase perselisihan /konflik yang diselesaikan	%	95	19,551,800,474	152	1,416,394,975	90	1,594,966,500	93.96	1,556,336,650	152	2,972,731,625	79	15.2
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				19,551,800,474		1,416,394,975		1,594,966,500		1,556,336,650		2,972,731,625		15.20
				Persentase Perselisihan yang terselesaikan	%	100	19,551,800,474		1,416,394,975	90	1,594,966,500	93.96	1,556,336,650	152	2,972,731,625	87	15.2
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				7,918,723,890		1,064,118,475		775,386,500		746,820,650		1,810,939,125		22.87
				Jumlah pencegahan kasus perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan	Perusahaan/koperasi	170		340		150		150		465		302.94	
				Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	600				0							



RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN

2024

			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di I (satu) Daerah Kabupaten/Kota			5,311,430,600		99,226,500		372,750,000		372,415,000		471,641,500		8.88
				Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang ditangani	Kasus	170		363		150		199		510		330.59
				Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	650				0						
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota				4,062,675,204		253,050,000		323,400,000		319,750,000		572,800,000	14.10
				Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan LKS Tripartit	Kali	10		5		10		10		11		110
				Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	200				0						
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				1,336,408,780		0		123,430,000		117,351,000		117,351,000	8.78
				Jumlah Pekerja yang aktif dalam BPJS	orang	160				150		100		100		67
				Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	orang	1000				0						



Pada tabel 2.5 diatas, dapat diketahui bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2022 secara rata-rata mencapai 96,57% baik indikator kinerja utama, program, kegiatan dan sub kegiatan. Untuk capaian dari setiap indikator kinerja secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Untuk capaian indikator kinerja utama dengan sasaran : "Meningkatnya pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan, indikator kinerja : Persentase Pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan yaitu sebesar 161,8%. Pada Tahun 2022, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan menargetkan pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan sebanyak 560 orang atau 40 % dari target 1.400 orang jumlah pencari kerja yang terdaftar (memiliki kartu pencari kerja/AK-1 yang diterbitkan oleh Dinas ketenagakerjaan Kota Medan) baik penempatan Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Dan melalui penyelenggaraan kegiatan Job Fair, Pelayanan Antar Kerja Antar Daerah/Lokal (AKAD/AKAL), pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan kegiatan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia, jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan sebanyak 1.870 orang dari 2.890 orang jumlah pencari kerja terdaftar atau sekitar 64,7%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan dengan rincian penempatan Dalam Negeri sebanyak 616 orang dan Luar Negeri sebanyak 1.254 orang. Apabila dibandingkan dengan Capaian Kinerja pada Tahun 2021 sebesar 54,61%, capaian kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan tidak hanya jumlah pencari kerja yang ditempatkan, tetapi juga dari jumlah pencari kerja terdaftar (memiliki kartu AK-1).

Adapun yang mendukung capaian kinerja tersebut diatas adalah :

1. Mulai pulihnya keadaan ekonomi pasca pelaksanaan PPKM akibat pandemi Covid-19
2. Dibukanya kembali penerimaan PMI oleh Negara Tujuan yang selama pandemi Covid-19 ditutup
3. Terjalinnya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan perusahaan dalam hal informasi lowongan kerja
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Media Sosial dalam penyebaran informasi lowongan kerja

Dibalik pencapaian tersebut, permasalahan yang dihadapi saat ini yang mempengaruhi pelaksanaan program penempatan kerja bagi pencari kerja adalah :

1. Tidak seimbangnya peningkatan jumlah pencari kerja dengan ketersediaan lowongan pekerjaan
2. Tingginya angka pengangguran bagi lulusan SMK yang seyogiannya merupakan lulusan yang siap kerja



3. Perkembangan Teknologi informasi yang sangat cepat yang menuntut peningkatan kualitas SDM para pencari kerja

Untuk menindaklanjuti permasalahan diatas sebagai upaya peningkatan capaian indikator kinerja ini pada tahun-tahun selanjutnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya fokus dalam penyediaan informasi lowongan kerja untuk ditempatkan pada perusahaan-perusahaan tetapi juga fokus pada program untuk penciptaan wirausaha baru
2. Diperlukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam hal penyediaan lowongan kerja bagi tamatan SMK serta peningkatan kualitas lulusan SMK
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi secara optimal melalui penyediaan layanan aplikasi yang memberi kemudahan akses baik bagi perusahaan sebagai penyedia lowongan kerja maupun bagi para pencari kerja.

- b) Untuk capaian indikator kinerja utama dengan sasaran : "Meningkatnya Keahlian Tenaga Kerja, indikator kinerja : Persentase Pencari kerja bersertifikat yaitu sebesar 109.6%. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi kinerja yakni 98.8% lebih tinggi dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 90%. Pada Tahun 2022, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan menargetkan pencari kerja yang akan dilatih sebanyak 222 orang namun pada APBD-P ada penambahan anggaran (Pergeseran anggaran dan Dana Insentif Daerah) untuk program pelatihan sehingga target jumlah yang akan dilatih bertambah menjadi 263 orang. Dari jumlah tersebut, ditargetkan 90% mendapatkan sertifikat keahlian. Dan setelah dilakukan uji kompetensi pada setiap bidang pelatihan, peserta yang lulus dan berhak mendapat sertifikat keahlian sebanyak 260 orang atau 98,8% lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Capaian ini tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan pelatihan yang sesuai dengan rencana dan target kinerja yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Capaian Kinerja pada Tahun 2021 yakni 112,3% sedikit mengalami penurunan, akan tetapi bila dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang dilatih dan mendapat sertifikat justru meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya mencapai 174 orang menjadi 260 orang pada tahun 2022.

Pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Tingginya antusiasme peserta pelatihan dalam mengikuti program pelatihan. Peserta pelatihan merupakan pencari kerja yang lulus seleksi dari sekian banyak pencari kerja yang terdaftar.
2. Program Pelatihan yang diselenggarakan sesuai kebutuhan pasar kerja saat ini sehingga minat pencari kerja dalam mengikuti pelatihan sangat tinggi
3. Terjalannya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sehingga pelaksanaan pelatihan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.



Adapun permasalahan yang dihadapi saat ini yang dapat mempengaruhi intervensi program pelatihan bagi pencari kerja adalah :

1. Semakin tingginya jumlah pencari kerja yang akan dilatih sehingga dibutuhkan penambahan anggaran program pelatihan.
2. Masih rendahnya kualitas LPK sehingga dibutuhkan pembinaan melalui sertifikasi LPK
3. Adanya *Miss match* antara kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan industri dan dunia usaha sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik dan kolaborasi antar instansi terkait

Untuk menindaklanjuti permasalahan diatas sebagai upaya peningkatan capaian indikator kinerja ini pada tahun-tahun selanjutnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

1. Pemetaan program pelatihan prioritas sehingga dapat mengefektifkan penggunaan anggaran pelatihan yang tersedia
2. Pembinaan LPK dengan mendorong dilakukannya sertifikasi bagi semua LPK yang ada di Kota Medan guna peningkatan kualitas pelatihan yang diselenggarakan
3. Koordinasi yang baik antar instansi terkait dan seluruh *stakeholder* untuk meningkatkan konektifitas dan kesesuaian kurikulum pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry

Terhadap capaian renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2022 melalui pelaksanaan program dan kegiatan Pelatihan dan Produktifitas Kerja yang merupakan tahun kedua pelaksanaan renstra (Tahun 2021-2026) telah sesuai dengan target rencana kinerja yang ditetapkan yakni rata-rata 100%. Program Pelatihan kerja merupakan salah satu dari 56 program prioritas Bapak Walikota Medan yang termuat dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Program ini bertujuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat agar memiliki keahlian dan keterampilan kerja sehingga mampu berkompetensi dalam mendapatkan pekerjaan ataupun kompeten dalam berwirausaha. Selain itu juga sebagai upaya menekan angka pengangguran di Kota Medan yang sedikit mengalami penurunan dari 10,81% tahun 2021 menjadi 8,89 tahun 2022. Oleh sebab itu, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan akan terus berupaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan anggaran yang ada untuk mendukung pelaksanaan program pelatihan kerja dimasa yang akan datang. Kerjasama, Koordinasi dan Kolaborasi antar instansi dan *stakeholder* akan terus ditingkatkan sebagai salah satu tolak ukur dalam mencapai target yang telah direncanakan.

- c) Untuk capaian indikator kinerja utama dengan sasaran : "Meningkatnya perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak, indikator kinerja : Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak yaitu sebesar 107,4%. Pada Tahun 2022, Dinas Tenaga Kerja Kota Medan menargetkan Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kerja yang



layak sebanyak 7.560 perusahaan atau 70 % dari target 10.799 perusahaan terdaftar. Dan melalui penyelenggaraan program dan kegiatan Hubungan Industrial seperti pelaksanaan sosialisasi berbagai peraturan Ketenagakerjaan, Koordinasi dan kerjasama melalui forum Tripartit dan Depeko, Kerjasama dan Kolaborasi dengan instansi BPJS Ketenagakerjaan, penanganan dan penyelesaian yang baik dan cepat terhadap berbagai aduan kasus ketenagakerjaan, sampai Tahun 2022 diperoleh data jumlah perusahaan di Kota Medan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebanyak 9.440 perusahaan (perorangan/korporate) dari total 12.539 jumlah perusahaan terdaftar melalui aplikasi Wajib Laporkan Kementerian Ketenagakerjaan atau sekitar 75,28%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak maksudnya adalah perusahaan-perusahaan yang telah mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan peraturan ketenagakerjaan antara lain, Perusahaan telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Menyusun struktur skala upah, Membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan telah mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Apabila dibandingkan dengan Capaian Kinerja pada Tahun 2021 sebesar 99,2%, capaian kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan.

Adapun yang mendukung capaian kinerja tersebut diatas adalah :

1. Pembinaan kepada perusahaan melalui kegiatan sosialisasi dan Bimtek terkait peraturan-peraturan Ketenagakerjaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga meningkatkan tingkat ketaatan perusahaan terhadap aturan-aturan yang berlaku
2. Koordinasi yang baik antar seluruh **stakeholder**
3. Pelaksanaan Monitoring secara berkala ke perusahaan-perusahaan

Sedangkan permasalahan yang dihadapi saat ini yang mempengaruhi penerapan tata kelola kerja yang layak oleh perusahaan adalah :

1. Peraturan terkait ketenagakerjaan yang mengalami perubahan yang sangat cepat sehingga butuh penyesuaian baru oleh perusahaan
2. Semakin banyaknya tantangan yang dihadapi perusahaan akibat tekanan kondisi ekonomi yang tidak stabil yang tentu saja akan mempengaruhi konsistensi perusahaan dalam penerapan tata kelola kerja yang layak
3. Peningkatan jumlah perselisihan hubungan industrial akibat peningkatan kasus PHK oleh perusahaan
4. Pengawasan dan monitoring yang masih kurang optimal terhadap perusahaan dalam rangka pentaatan akan peraturan ketenagakerjaan

Untuk menindaklanjuti permasalahan diatas sebagai upaya peningkatan capaian indikator kinerja ini pada tahun-tahun selanjutnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :



1. Meningkatkan dialog secara persuasive dengan para pihak (pengusaha, pekerja, serikat) untuk sekuat tenaga tidak melakukan PHK melalui konsultasi, mediasi dan pembinaan ke perusahaan.
2. Mendorong peningkatan peran Lembaga Kerjasama Bipartit untuk mewujudkan hubungan yang harmonis di perusahaan.
3. Meningkatkan dialog dengan perusahaan, pekerja dan serikat terkait dengan kebijakan pengurangan upah oleh perusahaan harus dengan adanya kesepakatan bersama
4. Melakukan sosialisasi peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan jaminan sosial tenaga kerja

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan PD menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renja Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Keberhasilan merupakan sesuatu yang bersifat relatif dan sulit diukur sehingga untuk mengetahui keberhasilan perlu dibuat indikator-indikator yang lebih dapat diukur. Oleh karenanya, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan menetapkan indikator kinerja periode 2021- 2026 sebagai tolok ukur untuk dapat menilai keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator kinerja merupakan hal yang bersifat dinamis karena akan tergantung pada perkembangan kondisi, peraturan, anggaran, kebijakan dan lain-lain. Pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan akan memberi gambaran tentang sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan s/d Tahun 2022 (tahun ke-2 renstra) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.6 di bawah ini:



Tabel 2.6 (T.C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan
Tahun 2022

No	Indikator	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (%)						Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Pencari Kerja/ Tenaga Kerja yang bersertifikat	(Jumlah tenaga kerja yang mendapat sertifikat keahlian/jumlah tenaga kerja yang dilatih) x 100%	89%	90%	92%	93%	94%	95%	97,5%	98,8%	93%	94%	Jumlah pencari kerja yang dilatih sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang tersedia . Perencanaan pelaksanaan pelatihan akan terus dilakukan secara berkelanjutan setiap tahunnya dengan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pelatihan yang berkualitas sesuai kebutuhan sehingga pencari kerja telah siap bekerja dengan keahliannya serta profesional
2	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	(Jumlah pencari kerja yang terdaftar dan mendapatkan pekerjaan/ Jumlah pencari kerja yang terdaftar) x 100%	35%	40%	42%	45%	48%	50%	20,5%	64,7%	45%	48%	Mengoptimalkan upaya peningkatan jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penempatan pencari kerja sesuai kebutuhan serta lowongan pekerjaan di perusahaan
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	(Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kerja yang layak/ Jumlah perusahaan terdaftar) x 100%	69%	70%	72%	74%	76%	78%	68,6%	75,2	74%	76%	Meningkatkan penerapan tata kelola kerja yang layak di perusahaan yang ada di Kota Medan agar tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja

Dari tabel. 2.6 diatas tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2022, dapat dijelaskan bahwa sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yakni merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebutuhan pembangunan dan masyarakat serta stakeholder bidang ketenagakerjaan. Dari ketiga indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2021-2026, maka capaiannya masing-masing sudah di atas seratus persen (>100%). Pelayanan yang dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan seperti pelatihan bagi pencari kerja, penerbitan kartu pencari kerja, rekomendasi paspor bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), layanan bagi disabilitas, layanan jamsos



ketenagakerjaan dan penyelesaian kasus ketenagakerjaan melalui mediasi yang dilakukan, secara umum dapat berjalan dengan baik.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mempunyai tugas dan tantangan berat di masa depan. Sebagai institusi yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak pengurangan pengangguran perannya diharapkan menjadi optimal. Banyak tantangan yang dihadapi dan tuntutan yang harus dipenuhi. Situasi perekonomian mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap bidang ketenagakerjaan melalui penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran.

Beberapa isu penting yang ada saat ini yang terkait dengan ketenagakerjaan dan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam merealisasikan sekaligus mewujudkan peningkatan capaian kinerja pada tahun - tahun berikutnya sesuai target yang ditetapkan, yaitu antara lain :

a. Isu penting yang menjadi tantangan

- Masih tingginya Angka Pengangguran Terbuka (APK) di Kota Medan. Sesuai data BPS, Tahun 2022 APK Kota Medan sebesar 8,89% dan penyumbang terbesarnya adalah lulusan SMK
- Skill lulusan SMK masih rendah sehingga sulit masuk pasar kerja
- Kebutuhan Pasar Kerja semakin banyak menuntut penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- Akibat kemajuan teknologi, Tenaga Kerja dapat tergantikan oleh Robot (Artificial Inteligency)

b. Isu penting yang menjadi peluang

- Undang-Undang Cipta Kerja yang salah satu tujuannya memberikan kemudahan dalam berinvestasi. Hal ini akan berdampak pada peningkatan lapangan kerja
- Revolusi Industri 4.0 yang menurut pandangan beberapa ahli ekonomi dapat menciptakan 27 – 46 Juta Pekerjaan Baru
- Meningkatnya Negara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Luar Negeri yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang kerja ke Luar Negeri
- Bonus Demografi yang artinya Penduduk Usia Produktif di Indonesia mencapai 203,97 juta dan 2,9 jt masuk pasar kerja setiap tahunnya



2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Medan tahun 2021 - 2026 yang termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2021 - 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2021 - 2026, dimana arah pembangunan Kota Medan yang berkaitan dengan Dinas Ketenagakerjaan adalah peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan pemenuhan hak – hak pekerja sehingga perencanaan program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tahun 2024 ditekankan pada perluasan kesempatan kerja berupa kegiatan pelatihan dalam rangka meningkatkan link and match agar menambah kemampuan serta keahlian pencari kerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan pembinaan bagi masyarakat agar membuka lapangan kerja mandiri sehingga dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat di Kota Medan. Review terhadap rancangan awal RKPD tertera pada tabel 2.7 berikut :



Tabel 2.7 (T - C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia		15,018,681,638	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia		14,743,239,748
I.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		220,000,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		50,551,000
I.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Medan	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	65,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Medan	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	50,551,000
I.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Medan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	30,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Medan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-



**RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2024

I.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Medan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	25,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Medan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-
I.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Medan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Medan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-
I.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Medan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	25,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Medan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-
I.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Medan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	25,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Medan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-
I.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Medan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	25,000,000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Medan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-
I.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11,905,616,363	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11,591,991,863
I.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan	11,576,250,000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	812 Orang/bulan	11,558,145,863
I.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Medan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	329,366,363	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Medan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	33,846,000
I.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah		361,955,131	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah		455,840,000



**RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2024

I.3.1	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Medan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	60 unit	50,000,000	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Medan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	80 unit	39,840,000
I.3.2	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Medan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75 paket	167,715,056	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Medan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	140 paket	168,000,000
I.3.3	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 orang	144,240,075	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 orang	248,000,000
I.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		535,059,550	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		888,199,909
I.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Medan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	90,405,000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Medan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	25,000,000
I.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Medan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	143,325,000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Medan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	239,992,909
I.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Medan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	106,891,675	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Medan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	100,000,000
I.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Kota Medan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	10,363,500	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Kota Medan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	49,990,000
I.4.5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Medan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	52,920,000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Medan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	38,700,000
I.4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	101,154,375	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	422,617,000



RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN

2024

I.4.7	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Medan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 Dokumen	30,000,000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Medan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 Dokumen	11,900,000
I.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		413,478,508	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		526,325,490
I.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Medan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	200,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Medan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	140,000,000
I.5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Medan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	213,478,508	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Medan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	386,325,490
I.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,041,959,586	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		897,916,100
I.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	10,528,875	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	22,000,000
I.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	326,518,605	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	240,000,000
I.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	704,912,106	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Medan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	635,916,100
I.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		540,612,500	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		332,415,386



**RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2024

1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Medan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	220,500,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Medan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	122,576,150
1.7.2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Medan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	50,000,000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Medan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-
1.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Medan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	132,300,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Medan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	109,839,236
1.7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Medan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	110,250,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Medan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100,000,000
1.7.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Medan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	-	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Medan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-
1.7.6	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Medan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	27,562,500	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Medan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-
II	Program Perencanaan Tenaga Kerja		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		110,000,000	Program Perencanaan Tenaga Kerja		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		94,394,116



RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN

2024

II.1	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Tersedianya Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)		110,000,000	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Tersedianya Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)		94,394,116
II.2.	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Medan	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	50,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Medan	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	94,394,116
II.3	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Medan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	5 Perusahaan	60,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Medan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	-	-
III	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase Pencari Kerja yang Terlatih		2,501,984,180	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase Pencari Kerja yang Terlatih		1,997,975,150
III.1	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		2,375,089,500	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		1,733,469,050
III.1.1	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Medan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	478 orang	1,568,291,900	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Medan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	197 orang	1,388,586,750
III.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	40 Lembaga	806,797,600	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	80 Lembaga	344,882,300
III.2	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		50,000,000	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		218,086,600
III.2.1	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Medan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	50,000,000	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Medan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	60 Lembaga	218,086,600



**RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2024

						Kerja Swasta				
III.3	Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan pembinaan produktivitas		30,000,000	Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan pembinaan produktivitas		-
III.3.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	5 perusahaan	30,000,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	-	-
III.4	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		46,894,680	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		46,419,500
III.4.1	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Medan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	16 Dokumen	46,894,680	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Medan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	16 Dokumen	46,419,500
IV	Program Penempatan Tenaga Kerja		Persentase pemenuhan Lowongan pekerjaan		1,292,000,000					637,363,743
IV.1	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		407,000,000	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		193,655,500
IV.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	50 orang	37,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	-	-
IV.1.2	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	50 orang	40,000,000	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	-	-



RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN

2024

IV.1.3	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	550 orang	70,000,000	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	400 orang	107,322,040
IV.1.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	50 orang	210,000,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	50 orang	86,333,460
IV.1.5	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	15 orang	50,000,000	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	-	-
IV.2	Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LPTKS yang aktif melaksanakan penempatan		100,000,000	Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LPTKS yang aktif melaksanakan penempatan		-
IV.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kota Medan	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	20 Lembaga	50,000,000	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kota Medan	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	-	-
IV.2.2	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Medan	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	20 Lembaga	50,000,000	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Medan	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	-	-
IV.3	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Lowongan Kerja dibandingkan dengan Pencari Kerja		240,000,000	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Lowongan Kerja dibandingkan dengan Pencari Kerja		211,355,775
IV.3.1	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Medan	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	30,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Medan	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	72,000,000



**RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2024

IV.3.2	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Medan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	50 orang	50,000,000	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Medan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	-	-
IV.3.3	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Kota Medan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	150 orang	160,000,000	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Kota Medan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	800 orang	139,355,775
IV.4	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PMI yang bermasalah		440,000,000	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PMI yang bermasalah		232,352,468
IV.4.1	Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	200 orang	340,000,000	Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	620 orang	232,352,468
IV.4.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 orang	100,000,000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	-	-
IV.5	Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kerja Asing yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kota		105,000,000	Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kerja Asing yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kota		-
IV.5.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah tenaga kerja asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kota	50 orang	105,000,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah tenaga kerja asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kota	-	-



RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN

2024

V	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		- Persentase Peningkatan lembaga hubungan industrial di perusahaan		1,980,000,000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		- Persentase Peningkatan lembaga hubungan industrial di perusahaan		2,114,502,487
			- Persentase perselisihan /konflik yang diselesaikan					- Persentase perselisihan /konflik yang diselesaikan		
V.1	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan		160,000,000	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan		-
V.1. 1	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	25 perusahaan	50,000,000	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	-	-
V.1. 2	Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	25 perusahaan	50,000,000	Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	-	-
V.1. 3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 laporan	60,000,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-	-



RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN

2024

V.2	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perselisihan yang terselesaikan		1,820,000,000	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Perselisihan yang terselesaikan		2,114,502,487
V.2.1	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	150 Perkara	540,000,000	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	150 Perkara	870,000,000
V.2.2	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	160 Perkara	600,000,000	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	165 Perkara	637,834,487
V.2.3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	100,000,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	-	-



RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN

2024

V.2. 4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	50 Lembaga	420,000,000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan/ Luar Daerah	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	50 Lembaga	606,668,000
V.2. 5	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Medan/ Luar Daerah	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	250 orang	160,000,000	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Medan/ Luar Daerah	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	-
	TOTAL				20,902,665,818					19.587.475.244



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kebutuhan atas program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah melalui proses sosialisasi, musrenbang dan penerimaan usulan program dan kegiatan yang bersumber dari masyarakat, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2024 merupakan program dan kegiatan yang menyentuh bidang ketenagakerjaan terutama pencari kerja, pekerja dan pengusaha sebagai stakeholders yang tidak akan bisa dilepaskan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan yang ditujukan untuk ditampung ke dalam Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2024 yaitu dari 71 usulan kegiatan melalui musrenbang kelurahan dan hasil Reses DPRD, Dinas Ketenagakerjaan akan mengakomodir usulan tersebut melalui 22 paket pelatihan dengan target 336 orang. Usulan pelatihan terbanyak adalah pelatihan barista, content creator dan design grafis serta pelatihan bagi penyandang Disabilitas. Pelatihan ini sudah dimulai sejak 2 (dua) tahun terakhir. namun ada beberapa usulan kegiatan pelatihan yang baru seperti pelatihan mengemudi SIM A yang masih dalam tahap telaah untuk melihat dampak kemanfaatannya untuk dimasukkan sebagai kegiatan prioritas. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.8. (T - C. 32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Besaran/Volume		Catatan
1	URUSAN KETENAGAKERJAAN						USULAN MUSRENBANG
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Kota Medan	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	17	%	
	1.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Medan	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi (Pelatihan, Pemagangan,Sertifikasi)	22	paket	
	1.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Medan	Jumlah Tenaga Kerja/Calon Tenaga Kerja yang Dilatih	336	orang	
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Kota Medan	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan	40	%	
	2.1	Pelayanan Antar Kerja	Kota Medan	Koordinasi layanan antar kerja	12	kali	
		2.1.1 Unit Layanan Disabilitas	Kota Medan	Jumlah Disabilitas yang dilayani	50	orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah Daerah (dalam hal ini Pemerintah Kota Medan) merupakan salah satu bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Nasional, sehingga perlunya keselarasan dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah tingkat di atasnya yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (lima) tahun serta harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif untuk menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan.

Perumusan tujuan dan sasaran rencana kerja perangkat daerah berdasarkan visi dan misi Wali Kota Medan. Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah untuk pembangunan Kota Medan. Visi Wali Kota Medan adalah “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif”. Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan visi yang ditetapkan, maka upaya pencapaian visi tersebut akan diimplementasikan melalui misi serta perumusan tujuan dan sasaran yang terkait dengan Dinas Ketenagakerjaan, antara lain :

- Medan Maju

Melalui misi medan maju akan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan pendidikan yang modern dan terjangkau oleh semua. Misi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Misi ini mempunyai tujuan dan sasaran, sebagai berikut:

1. Tujuan : Peningkatan pemenuhan hak – hak pekerja dengan sasarannya adalah meningkatnya perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak.

- Medan Inovatif

Melalui misi medan inovatif akan mewujudkan Kota Medan sebagai Kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan Human Capital (SDM) dan sosial budaya. Misi ini mempunyai tujuan dan sasaran, sebagai berikut :

1. Tujuan : Peningkatan produktivitas tenaga kerja dengan sasarannya adalah meningkatnya calon tenaga kerja yang memperoleh sertifikat keahlian.



2. Tujuan : Peningkatan penyerapan tenaga kerja dengan sasarannya adalah meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan.

Dengan adanya penjabaran tujuan dan sasaran maka langkah selanjutnya adalah menetapkan indikator kinerja agar dapat mencapai sasaran target kinerja yang telah dirumuskan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Perumusan sasaran yang akan direalisasikan dengan rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2024, yaitu :

- a. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebesar 74%
- b. Persentase Pencari Kerja/Tenaga Kerja yang memperoleh sertifikat keahlian sebesar 93%
- c. Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan sebesar 45%

3.3. Program dan Kegiatan

Menyikapi perubahan dan perkembangan yang terjadi secara global, seperti reformasi pemerintahan, baik pada tingkat pusat maupun daerah, serta dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan harus mampu menyelenggarakan tugas-tugas yang berkaitan dengan tenaga kerja. Untuk memberikan gambaran serta wajah masa depan yang didambakan, yang akan menentukan arah masa depan yang realistis dan terukur.

Dalam rangka percepatan pembangunan Kota Medan sangat dibutuhkan perencanaan program dan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat melalui program – program Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang terkait dengan Visi dan Misi Wali Kota Medan serta diharapkan Dinas Ketenagakerjaan Medan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Medan dapat mewujudkan Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan kota secara bersama – sama oleh seluruh pemangku kepentingan kota.

Agar Visi dan Misi yang telah dijabarkan tercapai maka Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan menyelenggarakan tugas – tugas yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan merencanakan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 sebanyak 5 (lima) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan. Program dan kegiatan direncanakan akan dilaksanakan di Kota Medan dan luar daerah dengan sasaran kelompok masyarakat yang terkait adalah pengusaha, buruh dan pencari kerja. Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan pada tahun 2024 tertera pada tabel 3.1 berikut :



Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	URUSAN KETENAGAKERJAAN						
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia			14,743,239,748		15,661,430,229
I.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			50,551,000		225,750,000
I.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Medan	5 Dokumen	50,551,000	5 Dokumen	68,250,000
I.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Medan	-	-	1 Dokumen	32,500,000
I.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Medan	-	-	1 Dokumen	25,000,000
I.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Medan	-	-	1 Dokumen	25,000,000
I.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Medan	-	-	1 Dokumen	25,000,000



**RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2024

I.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Medan	-	-	1 Laporan	25,000,000
I.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Medan	-	-	1 Laporan	25,000,000
I.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11,591,991,863		12,189,562,500
I.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan	812 Orang/bulan	11,558,145,863	84 Orang/bulan	12,155,062,500
I.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Medan	1 Dokumen	33,846,000	1 Dokumen	34,500,000
I.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah			455,840,000		377,452,079
I.3.1	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Medan	80 unit	39,840,000	60 unit	50,000,000
I.3.2	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Medan	140 paket	168,000,000	75 paket	176,000,000
I.3.3	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Medan/Luar Daerah	80 orang	248,000,000	80 orang	151,452,079
I.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			888,199,909		565,312,528
I.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Medan	4 paket	25,000,000	4 paket	94,925,250
I.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Medan	4 paket	239,992,909	4 paket	150,491,250
I.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Medan	4 paket	100,000,000	4 paket	112,236,259
I.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Medan	4 paket	49,990,000	4 paket	10,881,675
I.4.5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Medan	12 laporan	38,700,000	12 laporan	55,566,000



**RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2024

I.4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Medan/ Luar Daerah	12 laporan	422,617,000	12 laporan	106,212,094
I.4.7	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Medan	60 Dokumen	11,900,000	60 Dokumen	35,000,000
I.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			526,325,490		444,152,433
I.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Medan	10 Unit	140,000,000	50 Unit	220,000,000
I.5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Medan	10 Unit	386,325,490	10 Unit	224,152,433
I.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			897,916,100		1,094,057,564
I.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Medan	4 laporan	22,000,000	4 laporan	11,055,318
I.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Medan	12 laporan	240,000,000	12 laporan	342,844,535
I.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Medan	12 laporan	635,916,100	12 laporan	740,157,711
I.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			332,415,386		765,143,125
I.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Medan	10 unit	122,576,150	10 unit	231,525,000
I.7.2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Medan	-	-	5 unit	50,000,000
I.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Medan	10 unit	109,839,236	10 unit	138,915,000
I.7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Medan	1 unit	100,000,000	1 unit	115,762,500



**RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2024

I.7.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Medan	-	-	1 unit	200,000,000
I.7.6	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Medan	-	-	1 unit	28,940,625
II	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja			94,394,116		55,000,000
II.1	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersedianya Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)			94,394,116		55,000,000
II.2.	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Medan	1 Dokumen	94,394,116	1 Dokumen	55,000,000
II.3	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Kota Medan	-	-	0 Perusahaan	-
III	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih			1,997,975,150		2,678,842,718
III.1	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			1,733,469,050		2,572,258,570
III.1.1	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kota Medan	197 orang	1,388,586,750	526 orang	1,725,121,090
III.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Kota Medan/ Luar Daerah	80 Lembaga	344,882,300	45 Lembaga	847,137,480
III.2	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			218,086,600		55,000,000
III.2.1	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kota Medan	60 Lembaga	218,086,600	25 Lembaga	55,000,000
III.3	Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan pembinaan produktivitas			-		-



RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN

2024

III.3.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kota Medan/ Luar Daerah	-	-	0 perusahaan	-
III.4	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja			46,419,500		51,584,148
III.4.1	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kota Medan	16 Dokumen	46,419,500	16 Dokumen	51,584,148
IV	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pemenuhan Lowongan pekerjaan			637,363,743		1,430,700,000
IV.1	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota			193,655,500		452,700,000
IV.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	Kota Medan/ Luar Daerah	-	-	50 orang	40,700,000
IV.1.2	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kota Medan/ Luar Daerah	-	-	50 orang	44,000,000
IV.1.3	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kota Medan/ Luar Daerah	400 orang	107,322,040	600 orang	77,000,000
IV.1.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Kota Medan/ Luar Daerah	50 orang	86,333,460	50 orang	231,000,000
IV.1.5	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Medan/ Luar Daerah	-	-	15 orang	60,000,000
IV.2	Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang aktif melaksanakan penempatan			-		105,000,000
IV.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Kota Medan	-	-	20 Lembaga	55,000,000
IV.2.2	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Kota Medan	-	-	20 Lembaga	50,000,000



RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN

2024

IV.3	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Lowongan Kerja dibandingkan dengan Pencari Kerja			211,355,775		264,000,000
IV.3.1	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Medan	1 Dokumen	72,000,000	1 Dokumen	33,000,000
IV.3.2	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kota Medan	-	-	50 orang	55,000,000
IV.3.3	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kota Medan	800 orang	139,355,775	200 orang	176,000,000
IV.4	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI yang bermasalah			232,352,468		484,000,000
IV.4.1	Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Kota Medan/ Luar Daerah	620 orang	232,352,468	200 orang	374,000,000
IV.4.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Kota Medan/ Luar Daerah	-	-	20 orang	110,000,000
IV.5	Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Asing yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kota			-		125,000,000
IV.5.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kota	Kota Medan/ Luar Daerah	-	-	50 orang	125,000,000
V	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	<i>- Persentase Peningkatan lembaga hubungan industrial di perusahaan</i> <i>- Persentase perselisihan /konflik yang diselesaikan</i>			2,114,502,487		2,165,000,000
V.1	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan			-		176,000,000
V.1.1	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kota Medan/ Luar Daerah	-	-	25 perusahaan	55,000,000



**RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN**

2024

V.1.2	Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kota Medan/ Luar Daerah	-	-	25 perusahaan	55,000,000
V.1.3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kota Medan/ Luar Daerah	-	-	12 laporan	66,000,000
V.2	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perselisihan yang terselesaikan			2,114,502,487		1,989,000,000
V.2.1	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kota Medan/ Luar Daerah	150 Perkara	870,000,000	150 Perkara	594,000,000
V.2.2	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Kota Medan/ Luar Daerah	165 Perkara	637,834,487	165 Perkara	660,000,000
V.2.3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kota Medan/ Luar Daerah	-	-	60 Asosiasi dan Serikat Pekerja	120,000,000
V.2.4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kota Medan/ Luar Daerah	50 Lembaga	606,668,000	50 Lembaga	450,000,000
V.2.5	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Medan/ Luar Daerah	-	-	250 orang	165,000,000
	TOTAL				19.587.475.244		21,990,972,947



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana kegiatan serta berdasarkan perhitungan yang realistik terhadap kemampuan daerah. Program terdiri dan kumpulan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai indikator keberhasilan tujuan yang ditetapkan. Program - program Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tahun 2024 adalah :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 3. Program Penempatan Tenaga Kerja
- 4. Program Hubungan Industrial

Adapun program dan kegiatan beserta pagu anggaran yang direncanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tahun 2023 tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program dan kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
<i>I</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>14,743,239,748</i>
I.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,551,000
I.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,551,000
I.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,591,991,863
I.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,558,145,863
I.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	33,846,000
I.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	455,840,000
I.3.1	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	39,840,000
I.3.2	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	168,000,000
I.3.3	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	248,000,000
I.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	888,199,909
I.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25,000,000
I.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	239,992,909



No	Program dan kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
I.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,000,000
I.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	49,990,000
I.4.5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	38,700,000
I.4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	422,617,000
I.4.7	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	11,900,000
I.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	526,325,490
I.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	140,000,000
I.5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	386,325,490
I.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	897,916,100
I.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22,000,000
I.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240,000,000
I.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	635,916,100
I.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332,415,386
I.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122,576,150
I.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109,839,236
I.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,000,000
II	Program Perencanaan Tenaga Kerja	94,394,116
II.1	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	94,394,116
II.1.	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	94,394,116
III	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,997,975,150
III.1	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1,733,469,050
III.1.1	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1,388,586,750
III.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	344,882,300
III.2	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	218,086,600
III.2.1	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	218,086,600
III.3	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46,419,500
III.3.1	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	46,419,500
IV	Program Penempatan Tenaga Kerja	637,363,743



No	Program dan kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
IV.1	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	193,655,500
IV.1.1	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	107,322,040
IV.1.2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	86,333,460
IV.2	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	211,355,775
IV.2.1	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	72,000,000
IV.2.2	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	139,355,775
IV.3	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	232,352,468
IV.3.1	Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	232,352,468
V	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2,114,502,487
V.1	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2,114,502,487
V.1.1	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	870,000,000
V.1.2	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	637,834,487
V.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	606,668,000
	TOTAL	19.587.475.244



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2024 merupakan suatu dokumen perencanaan tahunan yang akan menghasilkan program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Program dan Kegiatan yang direncanakan tersebut menjadi pedoman dan kinerja Dinas ketenagakerjaan Kota Medan sehingga meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan adanya perencanaan yang baik dan terarah.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MEDAN,**

ILLYAN CHANDRA SIMBOLON, S.STP, M.SP
Pembina Tk. I(IV/b)
NIP 198010231999121001